



It takes a world
to end violence against children

Wahana Visi
INDONESIA



Makalah Kebijakan
**Merdeka Belajar:
MERDEKA BAGI ANAK-ANAK
PALING RENTAN**

(Dari temuan Aktivitas Mendengarkan Suara Anak Atas Tanggap Darurat Covid-19)

Terima kasih atas dukungan:





©Wahana Visi Indonesia
Judul Foto: Anak-anak di Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia
(Selama Pandemi Covid-19)

Makalah Kebijakan

MERDEKA BELAJAR: MERDEKA BAGI ANAK-ANAK PALING RENTAN

(Dari temuan Aktivitas Mendengarkan Suara Anak atas Masa Tanggap Darurat Covid-19)

Penulis:

Tira Maya Maisesa Malino

Pengolah Data Jajak Pendapat:

Keumala Dewi (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak/PKPA)
Dannisa Myra Octavia (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak/PKPA)
Lies Rosdianty (Bidang Tumbuh Kembang Anak KPPPA)
Tira Maya Maisesa Malino (Wahana Visi Indonesia)
Jonathan Palumian (Universitas Kristen Petra Surabaya)

Peninjau:

Junito Drias - Adhimas Wahyu Agung Wijaya - Ayu Siantoro – Melliana Layuk
– Eduard Derry Christian

Desain dan Tata Letak:

Martin Dima

Ucapan terima kasih atas dukungan:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Sekretaris Nasional Satuan Aman Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA)

Pertimbangan Etis Penelitian dan Diskusi Daring yang melibatkan anak:

Wahana Visi Indonesia memastikan partisipasi yang aman dan etis dari anak-anak ketika mereka berbagi kisah mereka, dengan mematuhi protokol perlindungan anak. Nama anak-anak dianonimkan dan beberapa anak masuk dalam diskusi daring dipublikasi dengan nama depan saja. Semua foto diambil dan digunakan dengan persetujuan anak/wali mereka.

© Wahana Visi Indonesia, Mei 2020.

Dokumen ini bebas untuk dikaji, diabstraksikan, diperbanyak dan diterjemahkan baik sebagian maupun keseluruhannya, namun tidak dapat diperjualbelikan maupun digunakan untuk tujuan komersil.

Untuk kutipan: Wahana Visi Indonesia (2020). Makalah Kebijakan: Merdeka Belajar: Merdeka Bagi Anak-anak Paling Rentan (Dari temuan Aktivitas Mendengarkan Suara Anak atas Masa Tanggap Darurat Covid-19). Jakarta: WVI

Foto Depan ©Wahana Visi Indonesia/Joy Maluyo.

*Judul Foto: Anak-anak di Sigi, Sulawesi Tengah, Indonesia
(setelah bencana Tsunami, sebelum Pandemi Covid-19)*

Foto Dalam ©Wahana Visi Indonesia

*Judul Foto: Anak-anak di Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia
(Selama Pandemi Covid-19)*

Foto Belakang (c) Wahana Visi Indonesia

*Judul Foto: Kegiatan belajar anak di rumah selama pandemi di Kabupaten Sentani,
Papua, Indonesia*

Daftar isi

Ringkasan Eksekutif	5
Pendahuluan	6
Rumusan Masalah & Tujuan	7
Kebijakan Status Quo dan Tanggapan Anak-anak	7
A. Frekuensi Penggunaan Media Baru sebagai Saluran Informasi dan Risikonya	
B. Tantangan Adaptasi Metode Pembelajaran Jarak Jauh	
C. Pengaruh Psikososial dan Emosional Masa Jaga Jarak	
D. Dampak Ekonomi Keluarga dan Keterbatasan Akses Perlindungan Sosial	
Analisis	13
A. Merdeka Belajar dalam Konteks Pandemi untuk Anak-anak yang Paling Rentan	
B. Mempersiapkan Kebijakan Kembali ke Sekolah	
Rekomendasi Kebijakan	21

Ringkasan Eksekutif



Makalah ini dipublikasikan sebagai upaya Wahana Visi Indonesia (WVI) untuk mendorong kebijakan pemerintah yang lebih sensitif anak, khususnya anak-anak yang paling rentan. Jajak pendapat dari suara anak Indonesia yang dilakukan oleh WVI bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA-RI), dan Aliansi PKTA (Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak) bersama PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak) selama bulan Maret-April 2020 menemukan tanggapan anak-anak atas kebijakan pemerintah mengenai *Masa Jaga Jarak* yang mempengaruhi kehidupan mereka. Terdapat empat tantangan yang umum dikemukakan anak-anak selama *Masa Jaga Jarak* diberlakukan, yakni: 1) Adaptasi pembelajaran jarak jauh baik dari sisi metode maupun fasilitas pendukung; 2) Hubungan kesehatan mental dan kondisi sosial (psikososial); 3) Risiko menurunnya kondisi ekonomi keluarga dan akses perlindungan sosial; dan 4) penggunaan media baru yang berdampak pada keseharian anak-anak.

Berdasarkan empat temuan yang didapatkan, makalah kebijakan ini memberikan analisis dampak pendidikan selama pandemi Coronavirus disease (Covid-19). Disinyalir bahwa dampak jangka panjang dari Pandemi Covid-19 akan berpengaruh pada kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh para penentu kebijakan baik di tingkat nasional maupun lokal adalah menyadari bahwa pendidikan tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan akademis/kognitif, tetapi juga memperhatikan kebutuhan psikososial anak-anak. Anak-anak yang dihadapkan pada situasi kerentanan selama darurat bencana non-alam ini juga harus mengalami beban berlapis dari faktor kerentanan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada anak-anak yang

berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah, anak-anak yang mengalami kekerasan dan eksploitasi (termasuk lewat media daring), serta anak-anak yang mengalami diskriminasi ras dan dari wilayah Terdepan, Tertinggal dan Terluar (3T) di Indonesia, anak terdampak Covid-19, anak dengan kebutuhan khusus, dan dampak negatif lainnya yang diakibatkan oleh adanya Kebijakan Jaga Jarak Fisik, semakin memiliki peluang tertinggal dalam memperoleh pendidikan berkualitas.

Dengan adanya pengalaman ini, kami mendorong adanya implementasi *Belajar dari Rumah* dan ketika Kembali ke Sekolah yang inklusif, menjadikan sekolah sebagai pusat pelayanan kebutuhan dan perlindungan anak-anak. Ada sembilan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah pusat hingga daerah, yakni 1) Persiapan sekolah untuk melakukan buka-tutup sekolah dengan protokol yang melindungi tumbuh kembang dan memperhatikan aspek perlindungan anak; 2) Pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan (BOP) yang fleksible untuk pembelajaran jarak jauh dan kembali ke sekolah (atau kombinasi); 3) Pentingnya pedoman pembelajaran dari rumah dengan konteks lokal, penyesuaian kurikulum kembali ke sekolah dan perlunya kurikulum darurat dimasa mendatang; 4) Antisipasi kesenjangan pembelajaran untuk mengejar ketertinggalan; 5) Pentingnya pembekalan guru untuk berinovasi 6) Menjadikan sekolah sebagai sentral untuk menjawab kebutuhan anak; 7) Penerapan sistem monitoring dan perhatian pada anak putus sekolah, terpapar Covid-19, migrasi dan kelompok rentan lainnya; 8) Antisipasi stigma, efek penggunaan gawai/internet dan dukungan psikososial, 9) dan mendorong pelibatan suara anak dan remaja dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Kami tentu berharap anak-anak tetap dapat mengalami merdeka belajar di masa pembelajaran jarak jauh maupun ketika kembali ke sekolah –atau kombinasi keduanya, dalam menghadapi normal baru yang tentu melibatkan aspek inklusivitas bagi anak-anak dari kelompok paling rentan. Salam dari suara anak Indonesia, untuk Indonesia.

Jakarta, Mei 2020
Yayasan Wahana Visi Indonesia

Dr. Doseba T. Sinay, MBA
CEO & Direktur Nasional

I. Pendahuluan

Bilamana banyak negara memilih untuk melakukan karantina wilayah (*lockdown*), Indonesia sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020 memilih kebijakan jaga jarak (*social distancing*)¹ untuk menangani pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo dalam pidato pembentukan Gugus Tugas Covid-19² menghimbau agar masyarakat Indonesia memindahkan seluruh kegiatan belajar, ibadah dan kerja untuk dilakukan dari rumah. Langkah tersebut diambil untuk menahan laju penyebaran Covid-19.

Sejak penyebaran Covid-19 ditetapkan pemerintah sebagai darurat kesehatan³ dan bencana non-alam nasional⁴, anak-anak sering kali paling terpengaruh oleh kondisi darurat ini. Amanah undang-undang mewajibkan Pemerintah Pusat dan daerah bertanggung jawab dalam situasi darurat agar perlindungan anak diupayakan dengan cepat, termasuk akses pendidikan, pengobatan, rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan. Namun, perihal yang menjadi masalah mereka tidak sepenuhnya selalu dikonsultasikan oleh anak-anak. Padahal, hak anak untuk berpartisipasi diabadikan dalam Konvensi Hak Anak (UNCRC) untuk mengekspresikan pandangan anak-anak, untuk didengar dan untuk ditanggapi dengan serius.

Makalah Kebijakan ini menganalisa kebijakan berdasarkan data yang dikumpulkan dari perspektif anak-anak, dan berfokus pada anak-anak dari kelompok paling rentan (*The Most Vulnerable Children*). Rekomendasi kebijakan disampaikan berdasarkan temuan data dan pembelajaran dari negara lain. Dari hasil jajak pendapat dan diskusi daring dengan anak-anak yang dilakukan tiga lembaga secara

simultan, yaitu Ada Apa dengan Covid-19 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak⁵, Aliansi PKTA/PKPA⁶ dan Suaraku Lawan Covid-19 yang diusung oleh Wahana Visi Indonesia⁷, permasalahan tantangan adaptasi dari belajar di sekolah yang beralih ke belajar dari rumah sangat signifikan. Tidak hanya permasalahan metode pembelajaran dan fasilitas pendukung, namun tantangan psikososial dan ekonomi yang menjadikan beban ganda bagi anak-anak yang menjadi dampak dari kebijakan Belajar dari Rumah. Angka terbaru (Kemendikbud, 2020) menunjukkan dari penutupan sekolah di 534.630 Satuan Pendidikan di Indonesia, diperkirakan terdapat 68.729.037 Siswa dan 4.183.591 Guru yang melakukan Belajar Dari Rumah sebagai hasil dari pandemi Covid-19.

Sebagian besar sekolah menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh baik daring maupun luring. Tetapi, ada keresahan yang berkembang tentang bagaimana langkah ini berdampak pada para siswa yang paling tidak beruntung baik secara sosial, geografi, emosional dan finansial dalam masyarakat. Makalah kebijakan ini juga berfokus pada bagaimana kelompok ini terdampak secara pendidikan, emosional dan sosial - dengan penekanan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa anak-anak ini didukung secara memadai dalam pemenuhan hak pendidikan.

Untuk mengetahui gambaran isi dari makalah ini, bab 1 dan 2 membahas mengenai pendahuluan, rumusan masalah dan tujuan dari analisis kebijakan. Pada bab 3, kami memaparkan terlebih dahulu kebijakan status quo yang dilakukan pemerintah Indonesia yang juga berdampak pada 30% populasi penduduk

¹ Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

² Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Kepres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019

³ Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019

⁴ Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional.

⁵ Jajak Pendapat: Ada Apa Dengan Covid-19, 26-29 Maret 2020 Pengumpulan data dilakukan oleh Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada 770 responden anak usia dibawah 18 tahun.

⁶ Jajak Pendapat: Pandangan Anak Terhadap Covid-19 di Indonesia, 27 Maret - 3 April 2020. Pengumpulan data dilakukan oleh Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) kepada 5500 responden anak dibawah usia 18 tahun.

⁷ Jajak Pendapat: Suaraku Lawan Covid-19 di Indonesia, 2- 21 April 2020. Pengumpulan data dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia kepada 3100 anak di 30 provinsi.

yang berusia di bawah 18 tahun, terlebih 7 juta anak dari kelompok tersebut berasal dari kelompok rentan⁸. Sementara itu, dan memaparkan temuan masalah dari pendapat anak-anak dalam merespon kebijakan Masa Jaga Jarak. Kemudian, dua kebijakan yaitu Pedoman Belajar dari Rumah dan rencana

untuk Kembali ke Sekolah dipaparkan di bab 4 untuk melihat kelemahan dan kelebihan, dan pertimbangan yang diperlukan. Di bab terakhir, rencana implementasi/rekomendasi dipaparkan untuk memberi pertimbangan kepada para penentu dan pelaksana kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.

2. Rumusan Masalah dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana Kebijakan Masa Jaga Jarak yang dilakukan Pemerintah Indonesia berdampak kepada anak-anak (dari perspektif anak-anak)?
2. Bagaimana alternatif kebijakan dan rencana implementasi yang mendukung kebutuhan anak-anak dan mereka yang lebih rentan?

Mengacu kepada rumusan masalah yang dijelaskan di atas, adapun yang menjadi tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak Kebijakan Masa Jaga Jarak yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada anak-anak (dari perspektif anak-anak)
2. Untuk menyampaikan alternatif kebijakan dan rencana implementasi yang mendukung kebutuhan anak-anak dan mereka yang lebih rentan.

3. Kebijakan Status Quo dan Tanggapan Anak-anak

Sebelum kasus pertama di Indonesia diumumkan⁹, Presiden sudah menetapkan Covid-19 sebagai wabah¹⁰ sejak 4 Februari 2020. Presiden Jokowi kemudian membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019¹¹ yang dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran¹² yang mengatur tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di daerah. Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan

darurat bencana Covid-19. Penetapan status itu menjadi kewenangan Presiden untuk skala nasional dan masing-masing kepala daerah sesuai wilayah terjadinya skala bencana¹³.

Sejak itu, penerapan Jaga Jarak Sosial diberlakukan terutama di daerah pusat penyebaran, dimulai dari DKI Jakarta dan diikuti daerah lainnya. Dalam kurun waktu sebulan, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat¹⁴ dan Pembatasan Sosial Berskala Besar¹⁵. Dalam kebijakan pembatasan berskala besar, terdapat pelarangan kegiatan sosial & budaya yang

⁸ Diumumkan melalui media oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 2 Maret 2020 bahwa ada dua orang Indonesia positif virus Corona

⁹ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/104/2020

¹⁰ Kepres No. 7 tahun 2020

¹¹ Kemendagri - Surat Edaran No. 440/2622/ SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

¹² UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 51

¹³ Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 dan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020

¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020

mendatangkan kerumunan masa, pembatasan kegiatan dengan meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan transportasi dan pembatasan kegiatan keagamaan (termasuk pemakaman). Untuk memperkuat peran gugus tugas dalam penanganan Covid-19, Presiden menetapkan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan ini terjadi pengalihan anggaran dari APBN dan APBD yang berfokus pada penanganan penyebaran Covid-19. Hingga pada 20 Mei 2020, UU No. 2 tahun 2020 dikeluarkan berdasarkan Perppu 1 tahun 2020 yang menyesuaikan keuangan negara diarahkan ke penanganan Covid-19, bantuan sosial, stimulus ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan koperasi, serta antisipasi terhadap sistem keuangan.

Terkait dengan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan berbagai penyesuaian pembelajaran yang tidak membebani guru dan siswa, namun sarat nilai-nilai penguatan karakter seiring perkembangan status kedaruratan Covid-19¹⁶. Dalam konferensi pers (14/5) Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mendorong para guru untuk tidak menyelesaikan semua materi dalam kurikulum serta mendorong pembelajaran yang relevan seperti keterampilan hidup, kesehatan, dan empati.

Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 mengenai pembatalan ujian nasional (UN), penyesuaian ujian sekolah, implementasi pembelajaran jarak jauh, dan pendekatan *online* untuk proses pendaftaran siswa. Selain itu, terdapat kebijakan penyesuaian pemanfaatan bantuan operasional sekolah (BOS) dan BOP yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sekolah selama pandemi. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan

kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif.

Pada 18 Mei 2020, Surat Edaran No. 15 tahun 2020 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam masa darurat penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut, metode dan media pelaksanaan Belajar dari Rumah dibagi kedalam dua pendekatan yaitu dalam jaringan (*daring*) berupa tautan pembelajaran digital dan luar jaringan (*luring*) yaitu radio, televisi, bahan ajar cetak, dan alat peraga. Untuk mendukung fasilitas pembelajaran jarak jauh tersebut, Kemendikbud bekerjasama dengan penyedia Platform Pembelajaran Daring, penyediaan kuota internet gratis, penyiaran pembelajaran dari rumah oleh TVRI dan RRI, dan sebagainya¹⁷.

Meskipun banyak hal telah dilakukan pemerintah untuk mendukung Belajar dari Rumah, tidak semua program tersebut bisa berjalan secara inklusif. Wahana Visi Indonesia, KPPPA dan Aliansi PKTA (PKPA) memastikan apa saja tanggapan anak-anak terhadap kebijakan dan layanan pemerintah mengenai respon Covid-19 yang terkait dengan kehidupan mereka. Dalam situasi darurat tersebut, tiga jenis jajak pendapat dilakukan untuk memahami kebutuhan dan masalah paling mendesak yang diidentifikasi anak-anak selama jaga jarak dan memberi kesempatan mereka untuk menyampaikan ide kepada penentu kebijakan atau pemerintah.

Hasil tanggapan yang disampaikan oleh anak-anak mencakup empat masalah utama, yaitu A) frekuensi penggunaan media baru yang makin besar, B) tantangan adaptasi metode pembelajaran jarak jauh C) dukungan psikososial, dan D) kerentanan ekonomi bagi kelompok berpenghasilan rendah.

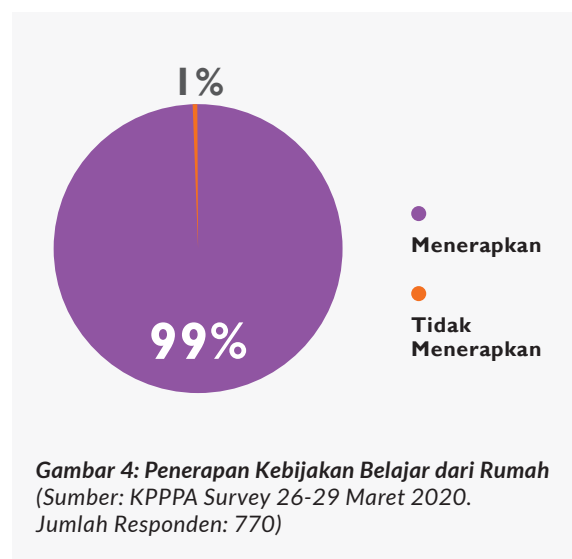
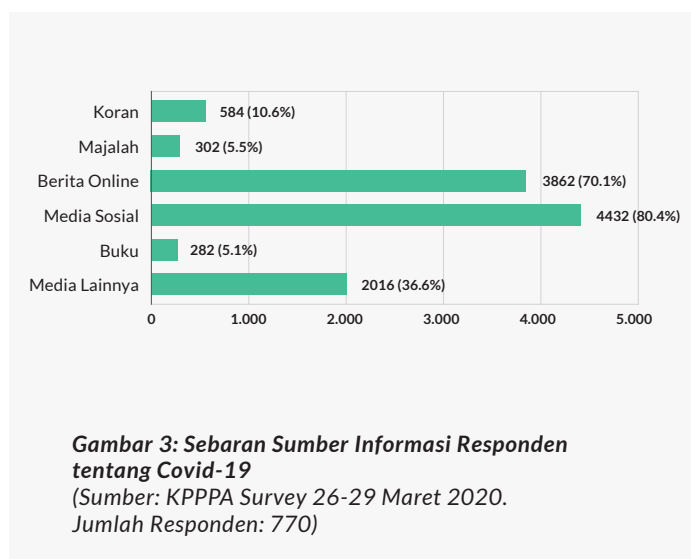
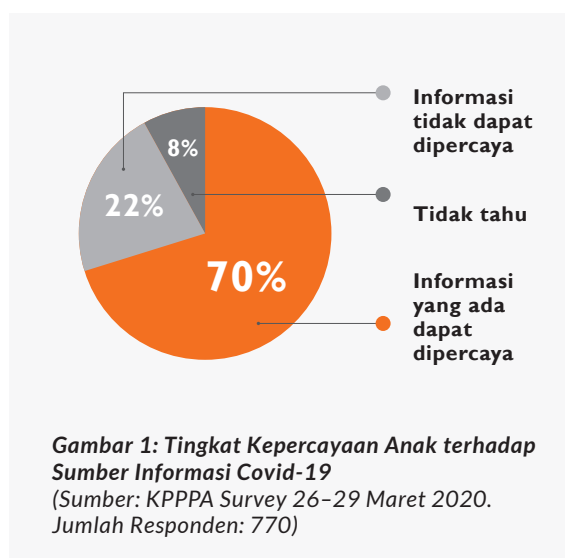
¹⁶ <https://setkab.go.id/> di akses pada 20 Mei 2020

¹⁷ <http://bersamahadapikoronakemendikbud.go.id/>

A. Frekuensi Penggunaan Media Baru sebagai Saluran Informasi dan Risikonya

Media yang menjadi sumber utama anak-anak dalam mendapatkan informasi mengenai Covid-19 adalah media baru, yakni media berbasis internet (Gambar 2 dan Gambar 3). Namun, hal ini beresiko pada dua hal yaitu resiko anak-anak tidak mendapat pengawasan yang cukup, dan informasi yang mereka terima belum tentu informasi yang valid dan bisa dipercaya (Gambar 1). Survey yang dilakukan Wahana Visi Indonesia pada 3-21 April 2020

mendapatkan informasi bahwa terdapat resiko 29-66% akses internet tidak dalam pengawasan berkala oleh orang tua. Perlu menjadi perhatian bersama bahwa frekuensi yang makin sering dalam penggunaan media daring beresiko terpaparnya informasi bohong dan penggunaan daring tanpa pengawasan orang tua membuat anak rentan terpapar pornografi, kekerasan online, dan kecanduan game¹⁸.

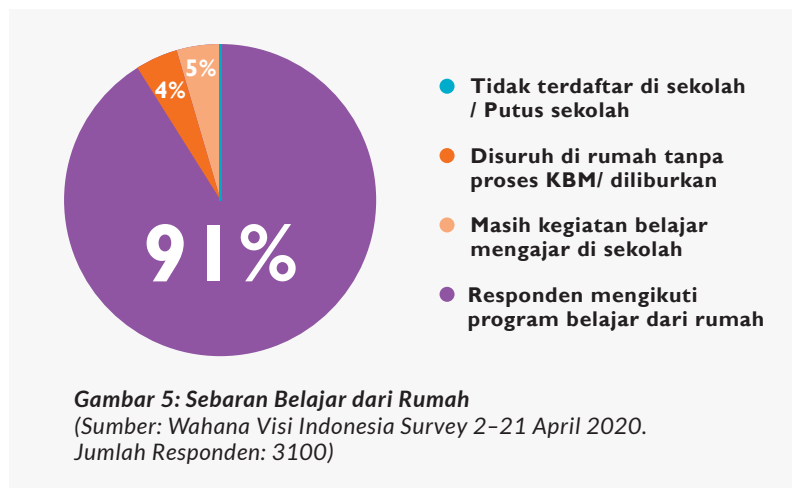


¹⁸ Berdasarkan Diskusi Daring Suaraku Lawan Covid-19 pada 6 Mei 2020

Seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dari Malang¹⁹ menyampaikan, “Banyaknya drama di dunia per-youtube-an (tutorial ngawur, pencurian hand sanitizer), hoax berkebaran tentang Pandemi covid-19, ... Hal itu semua membuat saya sedih dan tidak nyaman dengan negara saya”, ungkapnya. Semakin luasnya akses terhadap internet tanpa batas ini didukung oleh tuntutan program Belajar dari Rumah yang mengharuskan anak-anak mengakses daring lebih lama dari sebelum masa pandemi Covid-19. Terdapat 91% responden (Gambar

5) yang diusung oleh Wahana Visi Indonesia mengalami pengalaman pemindahan proses belajar mengajar dari sekolah ke rumah. Didukung oleh jajak pendapat yang dilakukan oleh KPPPA, sebanyak 99% responden (Gambar 4) menyatakan bahwa sekolah mereka menerapkan program belajar dari rumah. Hanya 1% yang menyatakan bahwa sekolah mereka tidak menerapkan program tersebut. Maka dari itu, tantangan adaptasi pembelajaran jarak jauh ini mengalami beban berlapis.

B. Tantangan Adaptasi Metode Pembelajaran Jarak Jauh



Kebijakan belajar di rumah masih memerlukan adaptasi yang penuh dengan tantangan. Pada awalnya, kebijakan ini diambil tidak seiring dengan status darurat daerah masing-masing. Pemerintah daerah pun mengikuti langsung kebijakan nasional sehingga pada pelaksanaan di lapangan banyak adaptasi metode Pembelajaran Jarak Jauh yang tidak sesuai kondisi lokal.

Sekitar 4-5% siswa terpaksa menjalani liburan sekolah atau/dan tetap aktif di sekolah dikarenakan tidak adanya fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh. Dalam diskusi daring tentang Suaraku Lawan Covid-19²⁰, hal yang sama diutarakan oleh Mira (17) dari Biak, Papua, bahwa tidak semua teman-temannya memiliki gawai dan televisi sehingga tidak bisa mengakses pembelajaran daring. Kalaupun ada, ternyata mereka tidak selalu mendapat sinyal sehingga kesulitan mengakses internet. Hal serupa disampaikan pula oleh seorang anak laki-laki (17 tahun) dari kota Ternate²¹, “Hal

yang membuat saya sedih di tengah wabah Corona ini adalah proses belajar mengajar secara daring (online) karena ada beberapa anak yang tidak dapat mengakses internet dan bahkan ada yang belum memiliki smartphone dan akhirnya mereka tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar secara daring (online)”. Selama masa jaga jarak, tantangan fasilitas yang tidak memadai, seperti ketersediaan kuota, akses internet/gawai, tidak ada TV, suasana rumah tidak kondusif, bayar SPP (swasta), dan sinyal internet ditemukan menghambat proses belajar mengajar.

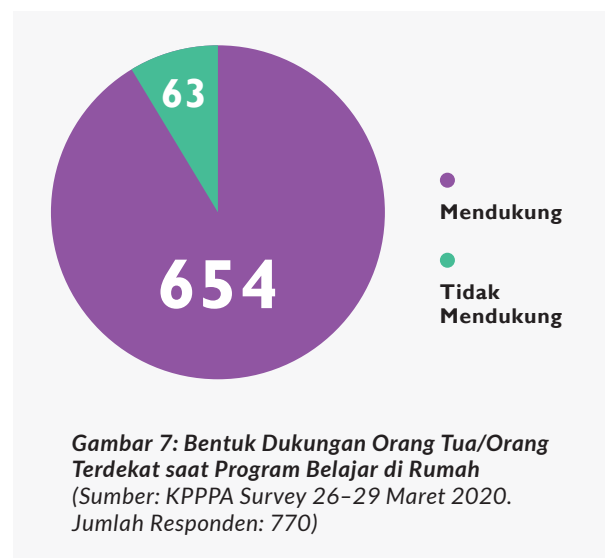
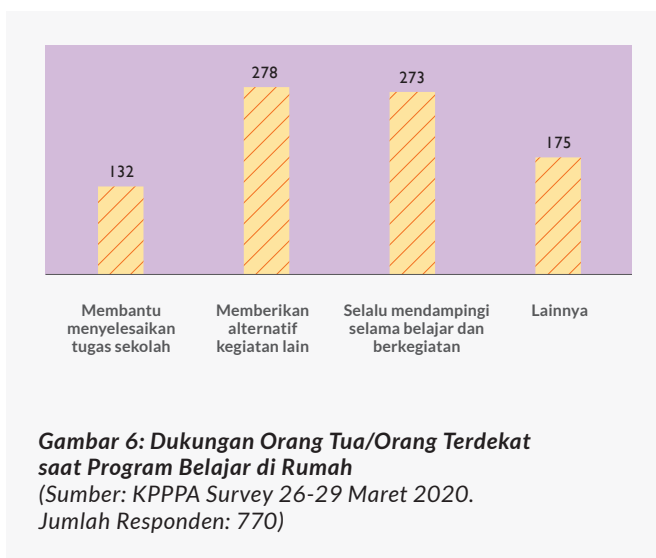
¹⁹ Jajak Pendapat: Suaraku Lawan Covid-19 di Indonesia, 2- 21April 2020. Pengumpulan data dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia kepada 3100 anak di 30 provinsi.

²⁰ Berdasarkan Diskusi Daring Suaraku Lawan Covid-19 pada 6 Mei 2020

²¹ Jajak Pendapat: Suaraku Lawan Covid-19 di Indonesia, 2- 21April 2020. Pengumpulan data dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia kepada 3100 anak di 30 provinsi.

Dari sisi metode pembelajaran yang menggunakan media daring dan luring, ditemukan bahwa meskipun 84% responden²² memiliki gawai, metode pembelajaran jarak jauh masih menyulitkan karena penerapannya hanya berbasis penumpukan tugas. Materi pun tidak dipahami karena peniadaan kegiatan belajar mengajar fisik dan jadwal belajar daring yang tidak teratur. Selain itu, anak-anak merasa bahwa guru masih kaku pada kurikulum, adanya

potensi kecurangan, serta orang tua yang meskipun mendukung tidak bisa menggantikan peran guru²³. Tantangan ini semakin nyata di wilayah timur Indonesia, seperti yang ditambahkan Mira dari Biak, Papua, “Setelah belajar di rumah, walaupun guru sudah memberi materi pembelajaran, perhatian dari orang tua minim. Anak-anak banyak diminta mengerjakan pekerjaan rumah,”.



Tantangan terbaru bagi orang tua adalah porsi beban mendukung anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar yang sebelum masa Jaga Jarak diserahkan lebih besar kepada sekolah dan guru kini diambil alih oleh para orang tua sendiri. Meskipun orang tua mendukung saat anak-anak mengikuti Program Belajar dari Rumah (Gambar 6), bentuk dukungan itu terbatas pada pendampingan dan alternatif kegiatan lain (Gambar 7). Pengalaman yang dialami anak-anak di wilayah pedalaman pun berbeda. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah (lulusan SD/SMP) dan kebutuhan kelanjutan ekonomi dengan panen di kebun membuat anak memilih

untuk membantu orang tua bekerja daripada memenuhi Belajar dari Rumah²⁴.

Masalah pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini terkendala “kebutuhan/fasilitas” dan “dukungan pembelajaran”. Terlebih lagi, 34% responden merasa suasana rumah mereka kurang nyaman. Sebanyak 68% responden pun menyatakan kecewa dengan dibatalkannya Ujian Nasional dan acara perpisahan sekolah yang sudah direncanakan jauh hari²⁵. Beban berlapis tersebut semakin diperkuat oleh masalah “stres” yang dialami anak-anak karena perubahan tiba-tiba yang terjadi.

^{22, 23} *ibid*

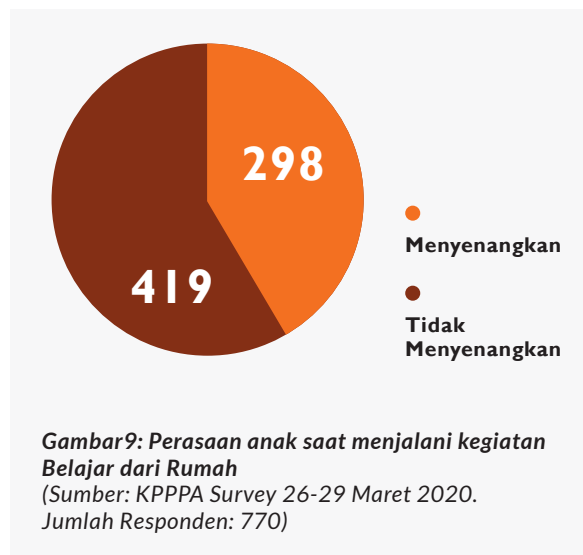
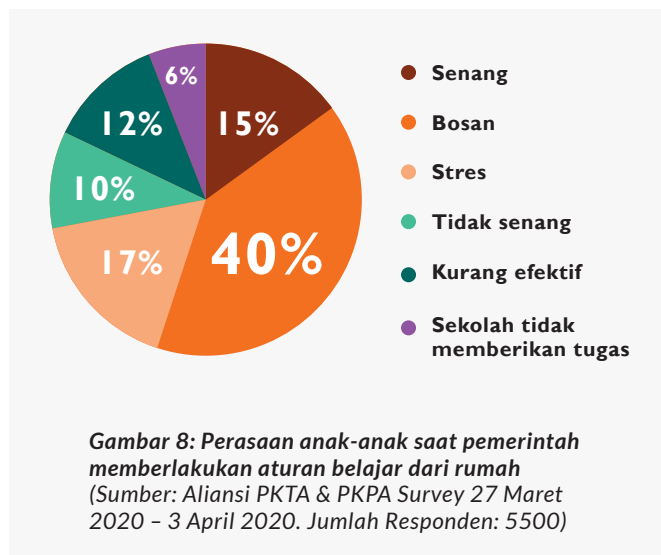
²⁴ Berdasarkan diskusi daring WVI “Tantangan dan Praktik Baik Belajar dari Rumah di daerah 3T”, pada 20 Mei 2020

²⁵ Jajak Pendapat Wahana Visi Indonesia 2020

C. Pengaruh Psikososial dan Emosional Masa Jaga Jarak

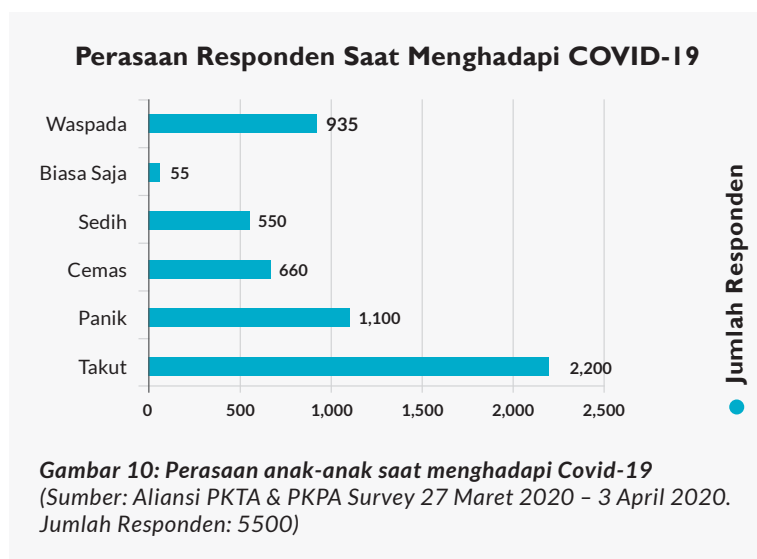
Kebijakan Belajar dari Rumah memberi dampak psikis bagi anak-anak. Dapat terlihat bahwa dampak kasus virus Covid-19 di Indonesia terhadap anak cukup besar, di antaranya menimbulkan efek bosan pada anak karena harus terus menerus berada di dalam rumah dan tidak bisa melakukan aktifitas di luar rumah

seperti bermain bersama teman²⁶. Faktor-faktor lain yang mendorong munculnya masalah psikis pada anak-anak diantaranya merasa terisolasi dari relasi pertemanan, merasa takut dan bosan (Gambar 8 & 10), tak dapat uang saku, dampak negatif suasana emosi anggota keluarga, dan rentan akan stigma sosial²⁷.



Masalah psikis ini dialami oleh anak berkebutuhan khusus perempuan usia 12 tahun di Kota Jambi²⁸ "Saat sekolah diliburkan saya sangat bosan berada di rumah", dan anak berkebutuhan

husus perempuan usia 16 tahun di Jakarta Barat, "Sering dipukuli atau pun di bentak bentak sama ibu. Buat pemerintah saya meminta agar pembelajaran sekarang dimudahkan".



Masalah mengenai stigma sosial yang mengaitkan Covid-19 dengan anak dari etnis tertentu pun terungkap dalam Jajak Pendapat²⁹, "Karena aku dari ras China, terkadang aku dikatakan pembawa Corona walau hanya bercanda tetapi tetap saja menyinggung perasaan", ungkap seorang anak perempuan usia 13 tahun di Tangerang Selatan. Anak perempuan lain berusia 15 tahun di Surabaya pun mengungkapkan hal senada, "Kami keturunan cina di-bully tanpa sebab dan dibilang pembawa corona".

²⁶ Jajak Pendapat: Pandangan Anak Terhadap Covid-19 di Indonesia, 27 Maret - 3 April 2020. Pengumpulan data dilakukan oleh Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) kepada 5500 responden anak dibawah usia 18 tahun.

²⁷ Jajak Pendapat Wahana Visi Indonesia 2020

²⁸ *ibid*

²⁹ Jajak Pendapat Wahana Visi Indonesia 2020

Faktor-faktor yang mendorong masalah kesehatan mental tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi yang dialami anggota keluarga

lain/orang tua, misalnya menurunnya kondisi perekonomian karena dampak dari wabah Covid-19, seperti pada bahasan di bawah ini.

D. Dampak Ekonomi Keluarga dan Keterbatasan Akses Perlindungan Sosial

Hal lain yang terungkap dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia terkait persoalan ekonomi keluarga anak-anak yang terdampak. Sebanyak 30 persen responden anak memiliki orang tua yang hanya bekerja di sektor informal dan mengandalkan penghasilan harian sehingga mereka pun kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Kekhawatiran akan persoalan ekonomi ini disampaikan oleh seorang anak perempuan berkebutuhan khusus berusia 17 tahun di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. *“Hal yang membuatku sedih di situasi ini adalah ayah tidak dapat mencari nafkah sehingga kami terancam perekonomian sangat minim,”*.

Selain itu, temuan kajian tersebut menyatakan bahwa keluarga pendatang atau tinggal di kontrakan/sewa memiliki potensi risiko tidak masuk dalam pendataan untuk program bantuan sosial dari pemerintah. *“Karena keluargaku dibedakan dengan RT RW setempat, karna kita hanya ngontrak(sewa) rumah, KTP-nya bukan KTP*

RT RW itu, tapi (meskipun) kita asli Bogor dan Jawa Barat, kita tidak dapat bantuan sama sekali” -- Anak Perempuan, 16 tahun, Bogor.

Masalah perekonomian keluarga ini menjadi beban ganda bagi anak-anak yang mengalami kondisi stres akibat Belajar dari Rumah. Ada kekhawatiran bahwa implementasi di lapangan terkait dengan pendataan bantuan jaring pengaman sosial (*safety net*) berpotensi melewati kelompok penyintas, pendatang, anak berkebutuhan khusus, pekerja sektor informal, korban PHK/kehilangan pekerjaan, dan penghasilan harian. Dari temuan-temuan di atas, alternatif solusi terhadap permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Pada bab selanjutnya, kami akan menelisik lebih dalam bagaimana implementasi Merdeka Belajar yang dapat melibatkan anak-anak dari kelompok paling rentan serta mempersiapkan diri anak untuk kembali ke sekolah dengan mempertimbangkan inklusifitas bagi semua anak yang memiliki hak untuk dilindungi dan bertumbuh kembang.

4. Analisis

Penutupan sekolah dalam jangka waktu lama kemungkinan akan berdampak besar pada pendidikan dan pengembangan anak-anak³⁰. CNN Indonesia³¹ dalam wawancaranya dengan pengamat pendidikan menyatakan bahwa metode Pembelajaran Jarak Jauh yang diterapkan selama pandemi Covid-19 membuat guru maupun siswa tak maksimal dalam menjalankan proses pembelajaran.

Dengan adanya kebijakan Belajar dari Rumah sebagai bentuk upaya pencegahan penularan Covid-19, diperlukan evaluasi bagaimana model Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia dapat berdampak pada anak-anak terutama dari mereka yang berada pada situasi paling rentan. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health³² menemukan bahwa 95 persen responden anak-anak memungkinkan melakukan

³⁰ Berckman, 2008 hal 375

³¹ <https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada 18 Mei 2020

³² *Ibid* hal 376

belajar dari rumah paling tidak selama 3 bulan. Namun, sejumlah 47 persen orang tua mengakui bahwa kelemahan sekolah di rumah terletak pada pemenuhan kebutuhan “fasilitas” dan “dukungan khusus”; dua sistem dukungan yang biasanya disediakan di sekolah (berdasarkan bab 3). Anak-anak dari tingkat ekonomi rendah memiliki risiko kerugian akademik lebih besar dibanding anak-anak dari kelompok keluarga ekonomi menengah ke atas karena akses terhadap fasilitas dan dukungan khusus tersebut jauh dari ideal.

Pada bab ini, akan ditelaah lebih jauh dua kebijakan penting yaitu kebijakan status-quo

terkait pembelajaran jarak jauh dan rencana kebijakan Kembali ke Sekolah berdasarkan temuan masalah pada bab sebelumnya. Saat ini, diskusi kebijakan seputar penutupan sekolah berfokus pada wacana— apakah akan membuka sekolah atau tetap menutup hingga jangka waktu yang lebih lama lagi. Sebuah rencana dengan skenario-skenario perlu dilakukan untuk menghindari potensi dampak buruk. Analisis dilakukan dengan mencoba melihat pengalaman-pengalaman negara lain dan melihat kondisi lapangan di wilayah Indonesia khususnya daerah dampingan WVI.



©Wahana Visi Indonesia

Anak-anak tidak mendapatkan akses teknologi sehingga melakukan kelompok belajar dengan mengikuti protokol pencegahan Covid-19. Lokasi; Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

A. Merdeka Belajar dalam Konteks Pandemi untuk Anak-anak yang Paling Rentan

Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah yang disahkan tanggal 18 Mei 2020³³. Menanggapi kebijakan ini, hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana kebijakan di tingkat lokal adalah penerapan pendidikan dengan mengkombinasikan pemenuhan kognitif dengan perilaku dan emosional—di mana ketiganya terkoneksi satu sama lain³⁴.

Sebuah studi Statistik Kanada menemukan bahwa penutupan sekolah karena pandemi memberi potensi dampak negatif secara akademik pada anak-anak terutama pada kualitas kegiatan pembelajaran³⁵. World Bank³⁶ menambahkan bahwa belajar dari wabah Ebola, dampak pandemi terhadap pendidikan lebih berat dialami negara-negara dengan hasil belajar yang sudah rendah, angka putus sekolah yang tinggi, dan daya tahan rendah terhadap guncangan. Dipengaruhi oleh lemahnya fasilitas dan pembelajaran jarak jauh (luar sekolah) tidak dapat menggantikan kehadiran guru dan hubungan pedagogis³⁷.

Melihat kebijakan di negara lain, sama seperti di Indonesia, pada 12 April 2020, pemerintah Queensland (Australia) mengumumkan bahwa kurikulum disampaikan melalui televisi karena konektivitas internet yang buruk³⁸. Di Selandia Baru, pemerintah mengumumkan dua saluran televisi untuk menyampaikan konten pendidikan, dikombinasikan dengan pengiriman internet dan pembuatan kurikulum cetak dengan menyediakan dana sebesar \$ 87,7 juta. Sejumlah negara seperti Cina dan Perancis memberikan pinjaman laptop atau tablet termasuk pulsa pra-bayar untuk akses internet. Untuk membantu penerapan praktis pengajaran *online*, Uni Emirat Arab membuat *hotline* bagi guru dan siswa untuk mencari dukungan teknis jika anak-anak menghadapi

kesulitan teknologi. Italia, yang sempat memiliki angka kematian tertinggi di dunia akibat Covid-19, menghabiskan jutaan dolar untuk meningkatkan akses internet di daerah-daerah terpencil dan mendukung pembelajaran daring untuk 8,5 juta siswa³⁹.

Pendidikan juga perlu menempatkan upaya khusus pada keterampilan sosial-emosional – yaitu empati dan solidaritas⁴⁰. Pemerintah Peru menangani kebutuhan emosional siswa, bersamaan dengan kebutuhan akademik dengan mengembangkan materi sosio-emosional untuk membantu siswa menangani isolasi saat tidak sekolah dan belajar di rumah.

Di Indonesia, permasalahan merdeka belajar dalam konteks Belajar dari Rumah tentu memiliki banyak tantangan seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Di NTT, Papua dan Kalimantan Barat, anak-anak di pedalaman ikut bekerja membantu orang tua ke kebun karena musim panen⁴¹. Dalam hal ini, pemahaman Belajar di Rumah bisa dianggap sebagai liburan, karena anak-anak diminta untuk lebih banyak menyelesaikan tanggung jawabnya untuk melakukan pekerjaan rumah membantu orang tua atau membantu di kebun. Peran orang tua belum dianggap maksimal, terlebih untuk anak-anak tingkat PAUD dan SD yang perlu pendampingan khusus dari orang tua/pendamping di rumah. Dengan demikian, perlu dukungan khusus kepada orang tua dari kelompok yang memiliki kemampuan terbatas baik kelemahan pendidikan dan ekonomi.

Di bawah ini merupakan tabel untuk menganalisa bagaimana penerapan kebijakan Belajar dari Rumah di Indonesia dalam kurun waktu dua bulan ini (sejak pertengahan Maret hingga pertengahan Mei 2020) dilihat dari prinsip dasar hak anak.

³³ SE Sesjen Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19

³⁴ Drane, C., Vernon, L. and O'Shea, S., 2020.

³⁵ Frenette, M, et.al. 2020

³⁶ World Bank blog diakses pada 19 Mei 2020

³⁷ Washington post diakses pada 19 Mei 2020

³⁸ Moore, 2020 dalam Drane, C., Vernon, L. and O'Shea, S., 2020.

³⁹ Washington post diakses pada 19 Mei 2020

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ Berdasarkan diskusi daring WVI "Tantangan dan Praktik Baik Belajar dari Rumah di daerah 3T", pada 20 Mei 2020

Tabel 1. Prinsip Dasar Hak Anak dan Belajar dari Rumah

PRINSIP DASAR HAK ANAK (UNCRC 1989)	KEBIJAKAN BELAJAR DARI RUMAH DI INDONESIA
<p>NON DISKRIMINASI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belajar dari rumah belum secara detail memperhatikan bahwa anak-anak yang menjadi PDP, ODP, atau terkena positif korona akan berpeluang besar tertinggal proses belajar mengajar dalam jangka waktu lama. Terlebih lagi, sistem pendidikan Indonesia pada umumnya memang belum punya solusi pendidikan alternatif saat anak sakit dengan jangka waktu lama. • Belajar dari Rumah belum bisa menyelesaikan permasalahan wilayah 3T termasuk anak/orang tua yang tidak lancar berbahasa Indonesia, anak-anak yang tidak punya akses teknologi yang diliburkan dan diberi tugas seadanya tanpa bimbingan semaksimal anak yang memiliki akses teknologi. • Anak LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan anak berkebutuhan khusus yang memang punya tantangan sendiri bahkan sebelum wabah Covid-19 (jika dibanding dengan pendidikan umum). Belum ada metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka disituasi darurat. Metode daring dan luring, dengan keterbatasan kemampuan bimbingan dan fasilitas akan berpotensi menimbulkan ketimpangan pemahaman materi pelajaran.
<p>KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan anak dalam pembuatan kebijakan dan layanan belum dilakukan. Penanganan situasi belajar yang tidak nyaman, metode belajar, fasilitas dan dukungan psikososial belum melibatkan umpan balik dari anak-anak dan belum memenuhi kebutuhan anak-anak yang berbeda. • Kekerasan di rumah memungkinkan terjadi baik itu kekerasan verbal, emosional, fisik, saluran daring dan pengabaian dari orang tua. Hal ini merupakan beban ganda/berlipat yang dialami peserta didik. • Masih minimnya penerapan upaya khusus pada keterampilan sosial-emosional dan <i>lifeskill</i> dalam materi sekolah terutama ketika Belajar dari Rumah. • Anak-anak yang terancam putus sekolah, migrasi (pindah/pulang kampung tapi tidak bisa kembali ke tempat perantauan), anak yang bekerja, anak ekonomi lemah yang bersekolah di swasta tanpa perlindungan sosial dan hamil/perkawinan anak akan makin berisiko untuk tidak kembali ke sekolah karena masa Jaga Jarak.
<p>HAK UNTUK HIDUP, KELANGSUNGAN DAN PERKEMBANGAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi yang membahayakan anak harus diminimalisir di lingkungan rumah, sekolah (termasuk sekolah virtual) dan masyarakat. Rumah harus menjadi tempat yang bersahabat agar mereka nyaman belajar, dan tentu memberi waktu memanfaatkan waktu luang. • Anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta dengan latar belakang keluarga menengah kebawah memiliki kesulitan lebih besar karena masih harus membayar SPP. • Penggunaan media baru memiliki risiko kekerasan, pornografi dan kecanduan <i>game</i>. Rumah tangga berpendapatan rendah lebih cenderung lebih minim dalam memanfaatkan perangkat seluler untuk mengakses internet daripada rumah tangga berpenghasilan lebih tinggi. • Risiko fisik, sosial, dan intelektual yang buruk karena minimnya nutrisi dan lingkungan yang tidak sehat di wilayah kumuh dan rendah sanitasi. • Siswa yang rentan yang mengalami kesulitan belajar sulit untuk pulih. Siswa yang berisiko putus sekolah, siswa yang tidak maksimal belajar selama BDR karena membantu orang tua bekerja di kebun atau lokasi rumah yang tak bisa dijangkau oleh guru untuk kunjungan rumah, siswa yang mengambil mata pelajaran bersifat praktik (SMK) sehingga tidak dapat melakukan komponen praktis akan ketinggalan banyak kesempatan.
<p>PENGHARGAAN TERHADAP PENDAPAT ANAK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua dan guru perlu meminta pendapat anak dalam ide metode pembelajaran yang cocok dengan mereka.

⁴² Berdasarkan diskusi daring WVI "Suaraku Lawan Covid-19", pada 6 Mei 2020

⁴³ Berckman, 2008 hal 385

Mengidentifikasi anak-anak paling rentan. Untuk menentukan siapakah anak-anak yang paling rentan diperlukan pemahaman empat dimensi faktor kerentanan yang dialami anak. Faktor kerentanan itu antara lain, apabila anak-anak ini mengalami lebih dari satu faktor kerentanan berikut ini, 1) anak-anak yang mengalami kemiskinan material termasuk akses kesehatan dan sanitasi, 2) kekerasan dan eksploitasi, 3) diskriminasi agama, ras, geografis, terdampak Covid-19, berkebutuhan khusus dan sebagainya; termasuk 4) dampak *negative* akibat situasi darurat, wilayah konflik dan bencana (baik alam maupun non-alam). Mereka yang mengalami beban berlapis dari empat faktor kerentanan tersebut dikategorikan sebagai anak yang paling rentan.

Peluang ketertinggalan karena masa jeda. Makalah kebijakan ini ingin menitikberatkan agar pemerintah bisa melihat permasalahan anak-anak yang berasal dari kelompok rentan agar menjadi perhatian khusus. Penelitian menunjukkan bahwa akses terbatas atau pembelajaran *online* yang tidak menguntungkan memiliki potensi ketertinggalan secara akademis. Studi terbaru di Kanada⁴⁴ menunjukkan bahwa siswa yang menerima pengajaran terlambat satu tahun, rata-rata, skornya 6% lebih rendah pada tes membaca, 5,9% lebih rendah dalam matematika, dan 4,0% lebih rendah dalam sains dibanding dengan dari teman-teman yang mengikuti jadwal normal. Ketertinggalan ini berpeluang terjadi di wilayah tertinggal Indonesia yang tidak mendapatkan pembelajaran jarak jauh secara maksimal. Dalam berita CNN Indonesia⁴⁵, Perkumpulan Federasi Serikat Guru mengatakan guru terpaksa memadatkan materi pembelajaran dalam kurikulum yang mestinya 10 bab menjadi lima bab saja, dan kebiasaan siswa belajar dari pukul 7.00 pagi 16.00 sore, kini hanya sampai pukul 13.00 siang. Tantangan lain dihadapi di konteks 3T yaitu sulitnya menghubungi siswa di wilayah yang sulit infrastruktur dan minim teknologi. Guru harus berjalan hingga enam kilometer lebih jauh karena anak-anak tidak ada di rumah dan sibuk

bekerja di kebun membantu orang tua mereka. Dalam hal ini, dikhawatirkan bila siswa mengalami ketertinggalan pemahaman kognitif, maka akan mempengaruhi performa akademik secara umum.

Layanan Kesehatan mental harusnya menjadi bagian dari layanan Belajar dari Rumah. Pentingnya menjaga kesehatan mental merupakan bagian yang tidak boleh terpisahkan proses belajar mengajar. Berdasarkan pembelajaran tersebut, UNESCO⁴⁷ memberikan saran keterlibatan mahasiswa magang (sama seperti aturan mahasiswa kedokteran untuk Rumah Sakit pelayanan Covid-19) agar dapat membantu sekolah dalam kapasitas pendampingan jarak jauh, terutama ketika mereka menyelesaikan praktikum magang. Menciptakan peluang pendampingan jarak jauh (atau kunjungan rumah/kelompok belajar dengan menerapkan protokol keselamatan⁴⁸) bisa memberikan manfaat timbal balik bagi sekolah, siswa, guru, dan mahasiswa. Ada juga peluang untuk memanfaatkan relawan, mentor universitas dan komunitas terlatih yang ada untuk memberikan dukungan tambahan kepada siswa sekolah dalam bentuk jarak jauh dengan saran dan dukungan yang ditawarkan melalui berbagai cara baik *online* maupun telepon.

Minim dukungan orang tua dari anak-anak kelompok ekonomi lemah dan lokasi 3T. Dalam pembelajaran daring atau luring, siswa lebih cenderung menghadapi kesulitan dalam pengaturan diri, motivasi dan memahami materi pembelajaran karena guru tidak hadir secara fisik (WVI, 2020). Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di Kanada terdapat, korelasi negatif antara belajar dari rumah dengan ekonomi lemah⁴⁹; anak laki-laki dan remaja dari keluarga penghasilan rendah cenderung memiliki daya paham materi pelajaran yang rendah. Orang tua berpenghasilan rendah pun cenderung kurang terlibat dalam kegiatan belajar anak-anak karena keterbatasan pengetahuan dan kesibukan dalam mencari penghasilan daripada orang tua dalam keluarga berpenghasilan menengah ke atas.

⁴⁴ Frenette, M, et.al. 2020

⁴⁵ <https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada 18 Mei 2020

⁴⁶ Berdasarkan diskusi daring WVI "Tantangan dan Praktik Baik Belajar dari Rumah di daerah 3T", pada 20 Mei 2020

⁴⁷ UNESCO, (2020a)

⁴⁸ Wahana Visi Indonesia, protokol kelompok belajar AP Landak, Kalimantan Barat, 2020

⁴⁹ Frenette, M, et.al. 2020 hal. 5

B. Mempersiapkan Kebijakan Kembali ke Sekolah

Data hasil jajak pendapat suara anak-anak menyatakan bahwa sekolah merupakan tempat yang jauh lebih baik dibandingkan Belajar dari Rumah⁵⁰. Selain wadah bagi anak-anak untuk melakukan relasi pertemanan, proses belajar mengajar di sekolah menjadi pilihan dibandingkan cara Belajar dari Rumah. Kembali ke Sekolah adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, maka pemerintah perlu merencanakan jauh hari mengenai skenario Kembali ke Sekolah.

Karena belum ditemukannya vaksin Covid-19, perlu adanya skema dan risiko-risiko⁵¹ yang diperhitungkan bilamana kebijakan Kembali ke Sekolah diberlakukan. Dalam hal ini perlu pertimbangan untuk memperhatikan wilayah zona penyebaran Covid-19 (merah, hijau, hitam), dan tetap berjaga-jaga menghindari kluster baru infeksi dan epidemi sekunder.

Melihat kebijakan di Eropa, dari website World Economic Forum⁵², Denmark dan Norwegia termasuk negara yang sudah memberlakukan Kembali ke Sekolah. Pemerintah Denmark menyarankan sekolah memberikan prioritas kepada siswa yang akan lulus secara bertahap. Protokol diberlakukan bagi sekolah dengan menempatkan tempat duduk jarak dua meter terpisah dan membuka jendela ventilasi untuk mematuhi pedoman jarak sosial. Norwegia juga menerapkan prinsip bertahap dengan membuka kelas siswa yang lebih senior yang kemudian diikuti bertahap siswa dari kelas yang lebih kecil seiring dengan penurunan tingkat penularan virus corona. Sekolah dibagi menjadi beberapa kelas dan dikelompokkan tidak lebih dari 15 siswa. Di Mesir, Rusia dan Belarus, sekolah menetapkan protokol untuk penanganan penyakit dan skenario penanganan potensi kasus di sekolah⁵³.

Di Asia, Jepang dan Cina juga menerapkan kebijakan Kembali ke Sekolah dengan sistem yang ketat. BBC melaporkan bahwa Kementerian Pendidikan China mewajibkan siswa memeriksakan suhu mereka di pintu masuk sekolah dan menunjukkan kode kesehatan “hijau” bebas Covid-19 melalui aplikasi penelusuran warga China. Kementerian Kesehatan Jepang merilis pedoman membuka kembali sekolah dengan syarat membuka jendela untuk ventilasi ruang kelas, menjaga jarak fisik, memeriksa suhu setiap hari dan mengenakan masker wajah. Sedangkan di Singapura dan Rusia⁵⁴, sekolah membatasi kontak fisik dengan mengurangi kegiatan sosial dan ekstra kurikuler.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bila dilakukan di Indonesia? DKI Jakarta membuat tiga skema pembukaan sekolah ditahun ajaran baru, pertama hanya sebagian sekolah yang dibuka berdasarkan warna zona penyebaran dengan semua siswa belajar disekolah. Kedua, sebagian sekolah dibuka dengan sebagian siswa yang belajar disekolah dan skema terakhir semua sekolah dibuka tetapi memberi kesempatan sebagian siswa tetap belajar dirumah⁵⁵. Hal ini bisa juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah lainnya yang memiliki konteks lokal berbeda. Pertimbangan jumlah rasio anak dengan kelas yang padat, keterbatasan jumlah guru, keterbatasan transportasi yang aman menuju sekolah, efektivitas pendanaan untuk mendukung fasilitas yang sesuai standard protokol dan kesiapan sekolah menjadi faktor sentral dalam melayani siswa dan masyarakat yang ODP, PDP dan positif Covid-19. Ketiga pilihan dibawah ini bisa dipilih berdasarkan ketentuan lokal/kebijakan sekolah itu sendiri.

⁵⁰ Jajak Pendapat: Suaraku Lawan Covid-19 di Indonesia, 2- 21April 2020. Pengumpulan data dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia kepada 3100 anak di 30 provinsi.

⁵¹ UNESCO – UNICEF Framework for reopening schools (April, 2020).

⁵² <https://www.weforum.org/> diakses 13 Mei 2020

⁵³ world bank blog

⁵⁴ *ibid*

⁵⁵ Kompas, 15 Mei 2020 Tahun ajaran baru, Pemprov DKI siapkan 3 skema siswa belajar di sekolah, diakses 21 Mei 2020

Tabel 2. Alternatif Solusi untuk kembali ke Sekolah

	PILIHAN 1	PILIHAN 2	PILIHAN 3
ALTERNATIF PROSES KEMBALI KE SEKOLAH TETAP BEBAS DARI PENULARAN COVID-19	Sekolah dibuka dengan pembatasan jumlah siswa dan kelas dengan mengutamakan siswa yang memang membutuhkan dukungan guru & sekolah yang ketinggalan pada masa jeda dan memberi kesempatan siswa yang orang tuanya khawatir bila siswa harus keluar rumah untuk tetap belajar di rumah saja.	Sekolah masih ditutup atau dibuka sebagian berdasarkan zona penyebaran Covid-19, tetap diterapkan kelompok belajar kurang dari 5 orang dan/atau kunjungan ke rumah dengan mengikuti protokol kesehatan, melibatkan relawan/ mahasiswa magang/tokoh agama.	Periode <i>stop-go</i> selama pemulihan, dengan model sekolah dibuka kembali dan kemudian ditutup kembali berdasarkan zona penyebaran Covid-19. Hal ini disebut <i>Blended Learning</i> yaitu kombinasi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran di sekolah yang melibatkan semua siswa.
KRITERIA 1: SUMBER DAYA MANUSIA	Pendamping siswa/ guru tertantang untuk mengerjakan beban ganda yaitu bertanggung jawab untuk siswa yang ke sekolah dan siswa yang masih belajar di rumah. Keterbatasan gerak guru yang berusia diatas 45-50 tahun	Diperlukan lebih banyak <i>staff</i> /relawan yang mendukung siswa. Lokasi 3T sulit bagi guru menjangkau rumah/ kebun siswa yang sulit infrastruktur dan jauh ⁵⁶ .	Pendamping/guru menyesuaikan periode tersebut, energi lebih ringan karena perlakuan kepada semua siswa sama. Risiko tinggi penyebaran Covid-19 untuk sekolah yang punya jumlah siswa banyak dalam satu kelas. Keterbatasan gerak guru yang berusia diatas 45-50 tahun
KRITERIA 2: EFEKTIVITAS BIAYA DAN WAKTU	Biaya ganda untuk belajar dari rumah dan biaya fisik sekolah sesuai protokol kesehatan	Biaya tambahan transportasi guru/ pendamping/siswa Waktu kunjungan rumah/ kelompok belajar tidak se-ideal manfaat yang didapat ketika bersekolah	Biaya ganda untuk belajar dari rumah dan biaya fisik sekolah sesuai protokol kesehatan.
KRITERIA 3: INKLUSIVITAS	Anak-anak dengan kebutuhan khusus, anak minim fasilitas pembelajaran, anak yang mengalami ketertinggalan materi dan lainnya bisa diutamakan dalam proses belajar mengajar disekolah	Anak-anak yang terancam putus sekolah atau tidak mengikuti proses belajar mengajar berpotensi mendapatkan dukungan dari mentor. Kelompok bisa dibagi berdasarkan tingkat kebutuhan atau wilayah.	Penelusuran anak-anak yang berisiko rentan lebih sulit seperti ketika masa jeda.

Pilihan-pilihan di atas memungkinkan dilakukan, namun dengan segala pertimbangan kriteria, baik itu memenuhi efektivitas biaya, inklusivitas dan ketersediaan sumber daya manusia. Apapun kriterianya, sekolah perlu mengutamakan mereka yang benar-benar membutuhkan fasilitas dan dukungan sumber

daya sekolah. Akan ada kelompok yang memang memerlukan dukungan kegiatan belajar mengajar secara fisik berdasarkan tingkat kebutuhan yang dialami anak dan juga mempertimbangkan anak atau keluarga yang mengalami stres dan ketakutan bila harus membawa anak ke sekolah.

⁵⁶ Berdasarkan diskusi daring WVI "Tantangan dan Praktik Baik Belajar dari Rumah di daerah 3T", pada 20 Mei 2020

KOTAK 1: Belajar dari Siera Leone mengenai pengalaman Ebola untuk kelompok anak-anak yang paling rentan

Pengalaman Kembali ke Sekolah di Siera Lonne pada bulan April 2015 didukung dengan keputusan data yang berdasarkan pada berapa hari negara itu bebas dari Ebola. Pemerintah membuka sekolah setelah jumlah kasus Ebola turun.

- Menghasilkan program kontinuitas belajar yang disiarkan melalui radio, TV dan *online*, serta menyediakan sumber daya seperti radio, buku pelajaran, panduan belajar dan peralatan bagi anak-anak yang paling miskin. Pemerintah membuka *hotline* gratis untuk mengajukan pertanyaan dan layanan bimbingan jarak jauh menggunakan nomor bebas pulsa di tingkat lokal.
- Memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dan guru dengan mengikuti pedoman kesehatan dan prosedur operasi standar. Guru dapat diberdayakan untuk memantau dan mengatasi kesejahteraan psikososial anak-anak. Perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan: anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak perempuan remaja. Di saat yang bersamaan, kesejahteraan psikososial guru perlu dipantau.
- Melacak pembelajaran di berbagai tingkatan kelas. Karena pembelajaran tidak dipantau selama epidemi Ebola, ketika kembali ke sekolah diperlukan intervensi kemajuan anak-anak dalam melek huruf dan berhitung dan melihat kesenjangan daya tangkap siswa dalam setiap mata pelajaran.
- Mengetahui bahwa yang paling miskin akan paling terkena dampak guncangan ekonomi. Pendapatan rumah tangga tahunan di Sierra Leone turun dari US

\$ 336 menjadi US \$ 131 selama epidemi Ebola dan ada peningkatan jumlah anak perempuan yang hamil. Intervensi dilakukan untuk melindungi yang termiskin dan paling rentan dan memungkinkan mereka untuk terus belajar seperti bantuan tunai bersyarat.

- Terjadinya situasi dimana pejabat dan guru yang dipindahkan ke tugas lain atau di PHK. Anggaran pendidikan krisis dan pasca krisis akan berada di bawah tekanan tetapi untuk pemulihan yang cepat dan efektif, dan sistem pendidikan harus menjaga dan melindungi guru. Gaji dipertahankan selama krisis Ebola dan kursus pelatihan yang dirancang khusus disiapkan untuk guru yang kembali direkrut.

Untuk melindungi anak perempuan dari resiko pernikahan dini (karena tidak bersekolah aktif terlalu lama dan masalah kesehatan reproduksi:

- Pembelajaran radio jarak jauh (akademik dan ekstra kurikuler) termasuk pendidikan seks dan keterampilan hidup
- Ruang aman bagi anak-anak yang rentan untuk mengakses dukungan dan pendidikan informal
- Media massa untuk pengiriman pesan yang lebih luas tentang praktik-praktik berbahaya, seperti pernikahan anak dan kekerasan seksual dan berbasis gender.
- Pesan sensitif gender dan anak di Covid-19 yang menjangkau khalayak dengan tingkat melek huruf rendah.

Sumber: Global Partnership for Education

KOTAK 2: Belajar dari Australia: Belajar dari Rumah selama Covid-19, dampak bagi anak-anak rentan di Australia

Saran tentang hasil pembelajaran pendidikan *online* versus di kelas memberi implikasi yang berbeda untuk siswa di komunitas metropolitan, terpencil, pedesaan dan masyarakat asli aborigin. Apa dampaknya pada hasil bagi anak-anak yang lebih rentan belajar dari rumah? Penelitian sampai saat ini memberi beberapa petunjuk mengenai kesulitan bagi anak-anak dari kelompok paling rentan:

- Pengaturan pembelajaran jarak jauh saat ini memiliki potensi untuk menghasilkan hasil pendidikan yang lebih buruk bagi hampir setengah dari siswa sekolah dasar dan menengah Australia.
- Siswa dengan risiko hasil belajar yang lebih buruk adalah anak-anak yang memiliki latar belakang sosial ekonomi rendah, mereka yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, mereka yang memiliki kebutuhan belajar khusus dan mereka yang berada di daerah pedesaan dan terpencil.
- Faktor-faktor yang mendukung efektivitas pembelajaran jarak jauh meliputi: a) akses ke teknologi

digital dan internet; b) lingkungan belajar di rumah dan dukungan keluarga; c) kesiapan dan kemampuan guru dan siswa.

- Ada bukti yang menunjukkan bahwa '*blended learning*', menggabungkan pembelajaran tatap muka dan jarak jauh, mungkin sama efektifnya dengan pembelajaran di kelas bagi banyak siswa.
- Memastikan bahwa semua anak dapat terus mengakses pembelajaran dan memajukan pembelajaran siswa. Tetapi, tidak semua anak memiliki posisi yang sama untuk melakukan ini. Beberapa anak sudah berisiko mengalami kegagalan sekolah kini harus belajar dari rumah. Anak yang hidup dalam kemiskinan, sering ditandai oleh status sosial ekonomi rendah, mereka yang disabilitas atau berkebutuhan khusus, siswa di daerah pedesaan atau terpencil Australia, dan mereka yang asli aborigin.

Sumber: Analysis and Policy Observatory

Dari pertimbangan diatas, maka rekomendasi kebijakan akan memasukkan saran-saran menuju normal baru.

5. Rekomendasi Kebijakan: Menjadikan Sekolah sebagai Titik Silang Layanan Anak-anak

Berdasarkan temuan masalah yang dilihat dari perspektif suara anak, data pelengkap lainnya dari media dan dokumen yang dikeluarkan lembaga PBB dan riset, menilik kebijakan status quo baik di negara Indonesia maupun negara lain, dan mempertimbangkan pemenuhan hak dan perlindungan anak terutama dari kelompok paling rentan, rekomendasi ini mendorong langkah yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam masa ini dan masa mendatang, baik itu fase “pemulihan” (*recovery*) atau yang saat ini lebih populer disebut situasi normal baru.

Hingga pertengahan Mei 2020, Pemerintah Indonesia sedang melakukan proses mendorong Kembali ke Sekolah. Sementara perekonomian dan tempat kerja akan diaktifkan kembali dengan panduan normal baru yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam

Kebijakan buka dan tutup sekolah.

Kebijakan nasional perlu menyediakan pedoman yang jelas kepada pemerintah daerah terkait dengan asesmen hingga pengambilan keputusan⁵⁷. Pada kondisi ini, sangat dimungkinkan bahwa keputusan kembali ke sekolah ada pada wewenang daerah (kota/kabupaten) bahkan level desa/kecamatan untuk menentukan otoritas sekolahnya. Pengalaman kajian dari 12 negara⁵⁸ terkait pandemi Influenza tahun 2009-2010, keputusan untuk menutup sekolah melibatkan pembuat kebijakan nasional, lokal dan administrator sekolah. Wilayah administrasi atau level provinsi/kabupaten/kota membuat rekomendasi tentang penutupan sekolah kepada tingkat

Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Maka dari itu, beberapa skenario Pembukaan Sekolah dari Kementerian Pendidikan membicarakan kemungkinan dibukanya kembali Sekolah pada bulan Juni, atau bulan Agustus atau bahkan mundur hingga bulan Januari⁵⁷.

Rencana Kembali ke Sekolah diperkirakan tidak serentak secara nasional. Hal ini karena pertimbangan kebijakan PSSB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tiap daerah, laju angka penyebaran Covid-19, konteks lokal dan strategi jenis layanan di tiap sekolah yang berbeda. Menanggapi pertimbangan diatas, diperlukan koordinasi Gugus Tugas Daerah yang melibatkan Gubernur/Walikota/Bupati beserta Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan yang memberi wewenang pembukaan kembali sekolah. Maka, rekomendasi ini mendorong penentu dan pelaksana kebijakan di tingkat nasional dan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan hal di bawah ini:

nasional. Di beberapa daerah, keputusan dibuat berbeda tergantung pada jenis sekolah dan angka penyebaran virus. Di Indonesia, daerah diberikan kebebasan untuk menentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Karena daerah yang tidak ada kasus atau jumlah kasus penyebaran sangat rendah sebenarnya bisa dibuka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekolah sudah mulai menyiapkan⁶⁰

- 1) protokol perlindungan *staff*, guru dan siswa,
- 2) protokol *blended teaching* atau kombinasi mengajar dari rumah dan di sekolah di konteks lokal,
- 3) protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di sekolah,
- 4) membangun model mekanisme buka tutup sekolah termasuk skema/kriteria pembukaan sekolah.

⁵⁷ Diskusi Klaster Pendidikan sampai 12 Mei 2020 oleh SekNas dan UNICEF

⁵⁸ UNESCO – UNICEF Framework for reopening schools (April, 2020).

⁵⁹ Cauchemez, S, et. al. 2014. Hal 9

⁶⁰ UNESCO – UNICEF Framework for reopening schools (April, 2020).

Penggunaan Dana BOS dan BOP fleksible untuk Pembelajaran Jarak Jauh dan Kembali ke Sekolah. Dalam situasi Belajar dari Rumah, di tingkat lokal diperlukan sosialisasi kebijakan penggunaan dana BOS sesuai SE Menteri no 4 tahun 2020 yang fleksible untuk mendukung pembelajaran Jarak Jauh. Dalam perencanaan Kembali ke Sekolah, Dana BOS perlu mengakomodir persiapan protokoler kesehatan, transportasi aman dan membantu guru dan siswa yang memerlukan fasilitas pendukung. Terlebih bilamana terdapat sekolah-sekolah yang mungkin digunakan untuk ruang isolasi atau kebutuhan pencegahan Covid-19 selama masa jaga jarak, diperlukan pembersihan, persediaan buku dan peralatan yang sudah disterilkan. Pembukaan kembali harus direncanakan dan dipersiapkan untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini termasuk ketersediaan air bersih, toilet bersih dan terpisah jenis kelamin, sanitasi, masker kain, *hand sanitizer*, nutrisi anak-anak dan dukungan psikososial bagi mereka yang terkena dampak⁶¹.

Pentingnya Pedoman Pembelajaran dari Rumah Konteks Lokal, Kurikulum Darurat dan Penyesuaian Kurikulum Kembali ke Sekolah. Penyesuaian kurikulum untuk mengantisipasi dan menghadapi normal baru perlu dilakukan jika memungkinkan ada kombinasi Belajar dari Rumah dengan Kembali ke Sekolah, seperti pendidikan dasar yang sudah memfokuskan ke literasi dan numerasi. Diperlukan juga penyesuaian mencakup kalender akademik dan memprioritaskan siswa di kelas yang mempersiapkan diri untuk ujian akhir⁶². Pada tingkat pemerintah daerah, perlu dilihat lagi tata kelola sekolah, termasuk di dalamnya protokol anak-anak menuju sekolah. Pedoman pembelajaran di rumah perlu sesuai dengan konteks lokal⁶³ yang memungkinkan penggunaan bahasa lokal masing-masing daerah. Untuk jangka panjang, pemerintah kita perlu menyusun kurikulum darurat untuk menghadapi wabah (Belajar dari Rumah).

Antisipasi Kesenjangan Pembelajaran untuk Mengejar Ketinggalan. Penutupan sekolah dan Belajar dari Rumah memiliki dampak yang berbeda bagi setiap siswa Mengingat tidak semua siswa mendapatkan akses fasilitas dan daya tangkap yang sama dan cepat dalam proses belajar mengajar melalui daring maupun luring, maka penyesuaian Kegiatan Belajar Mengajar diperlukan. Anak-anak dari keluarga ekonomi rendah, yang mengalami masalah kesehatan mental dan anak-anak yang berstatus ODP, PDP bahkan positif Covid-19 kemungkinan akan jauh di belakang rekan-rekan mereka yang lebih terfasilitasi ketika Belajar dari Rumah. Ketika sekolah dibuka kembali, diperlukan identifikasi dan membuat mekanisme mengatasi kesenjangan pembelajaran, menginformasikan program perbaikan sehingga semua anak dapat mengejar ketertinggalan dengan cepat.

Selain itu, akan lebih baik selama satu atau dua minggu pertama pembukaan kembali sekolah ada beberapa kegiatan yang menjembatani proses penyesuaian dengan bermain sehingga anak-anak tidak mengalami kekejutan. Bulan pertama masuk kembali sekolah, materi pembelajaran mungkin fokus pada pembangunan karakter, keterampilan hidup dan promosi kesehatan untuk membangun ketahanan di antara siswa dan guru.

Pentingnya pembekalan guru untuk berinovasi. Selama masa Pembelajaran Jarak Jauh, banyak guru tidak siap membimbing siswa terutama bagi mereka yang berada di wilayah 3T (daerah tertinggal, terdepan dan terluar). Tantangan guru dengan menggunakan media daring yang memiliki banyak aplikasi pendukung akan jauh lebih mudah dibandingkan kegiatan belajar mengajar yang masih tetap menggunakan sistem tatap muka terbatas. Oleh karena ini, guru dan siswa mulai dikenalkan dan diajarkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi. Pelatihan guru secara daring perlu lebih mendorong guru untuk berinovasi dan menjadi guru penggerak⁶⁴. Di saat bersamaan, guru dan *staff* perlu mengikuti

⁶¹ ibid

⁶² <https://blogs.worldbank.org/> diakses pada 19 Mei 2020

⁶³ Berdasarkan diskusi daring WVI "Tantangan dan Praktik Baik Belajar dari Rumah di daerah 3T", pada 20 Mei 2020

⁶⁴ Berdasarkan diskusi daring WVI "Tantangan dan Praktik Baik Belajar dari Rumah di daerah 3T", pada 20 Mei 2020

pelatihan khusus mengenai standar pencegahan Covid-19 (social distancing) dan penguatan kapasitas untuk menangani kebutuhan *mental health and psychosocial* (MHPSS) bagi siswa.

Sekolah memiliki peran sentral untuk menjawab kebutuhan anak.

Sekolah sebagai salah satu layanan yang paling dekat dengan anak-anak perlu memperkuat mekanisme koordinasi dan komunikasi dengan komunitas, pemerintah desa/kelurahan, Dinas Pendidikan, LPMP, perwakilan Komite Sekolah dan POS Pendidikan (SPAB di level Provinsi). Sekolah juga bisa memiliki peran sentral dalam aksi-aksi kemanusiaan seperti pemeriksaan kesehatan, program pemberian makan atau terapi untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pertimbangkanlah anak-anak kebutuhan khusus dan peserta didik yang terpinggirkan karena mereka berpotensi terkena dampak atau efek sekunder dari masa Jaga Jarak. Perlu juga dicatat bahwa pendidikan memiliki potensi untuk berkontribusi pada perlindungan anak-anak terutama yang berasal dari kelompok paling rentan. Oleh karena itu, sekolah perlu punya peran koordinasi dengan masyarakat sipil, pemerintah daerah dan pengurus desa. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan tata kelola yang dipimpin oleh pemerintah daerah dengan melibatkan kerjasama dengan sekolah dan pemerintah desa sebagai pemilik otoritas penggunaan dana desa untuk membantu bantuan langsung tunai atau beasiswa kepada anak-anak yang kesulitan akses pendidikan. Dalam hal ini, organisasi masyarakat sipil perlu terlibat mengawasi dan menghubungkan peran-peran sektoral tersebut.

Penerapan sistem monitoring terkait anak putus sekolah, terpapar Covid-19, migrasi dan kelompok rentan.

Sistem pemantauan absensi sekolah untuk melacak ketidakhadiran siswa dan staf perlu diterapkan. Sekolah pun perlu menyiapkan mekanisme monitoring dan secara berkala untuk memberi tahu otoritas kesehatan setempat tentang peningkatan ketidakhadiran siswa dan staf karena potensi penyebaran wabah. Selain itu, sekolah perlu mendata siswa yang tidak terdeteksi keberadaannya selama masa Jaga Jarak dikarenakan migrasi, pulang kampung,

mudik, ikut orang tua bekerja, anak yang terancam putus sekolah, bahkan anak-anak yang mengalami kehamilan dan kekerasan/eksploitasi.

Antisipasi Stigma dan Dukungan Psikososial.

Sekolah tetap harus mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial bagi siapapun dalam satuan pendidikan. Sekolah perlu memiliki alat untuk melindungi anak dari kekerasan daring dan memperkuat mekanisme sekolah anti-kekerasan berdasarkan Permendikbud 82/2015. Perlu diperhatikan akan adanya beberapa siswa yang mengalami pengucilan dan intimidasi. Perlindungan anak-anak untuk menghindari stigmatisasi siswa dan staf yang mungkin terpapar virus juga diperlukan. UNICEF, WHO dan IRCF⁶⁵ melaporkan bahwa penting untuk diingat bahwa Covid-19 tidak membedakan antara perbatasan, etnis, status disabilitas, usia atau jenis kelamin. Pendidikan harus terus ramah, menghormati, inklusif, dan menjadi lingkungan yang mendukung untuk semua, terutama melihat kemungkinan adanya siswa dari keluarga yang terpapar Covid-19 (baik langsung maupun tidak langsung). Sekolah perlu bekerja dengan petugas kesehatan sekolah / pekerja sosial / UPTD PPA untuk mengidentifikasi dan mendukung siswa dan staf yang menunjukkan tanda-tanda kesusahan atau kekerasan.

Pentingnya pelibatan suara anak dan remaja, anak merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat aktif di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu membuka ruang akuntabilitas sosial yang *sensitive* anak, agar mendapatkan umpan balik dari perspektif anak. Perlu adanya kampanye yang melibatkan anak dan remaja, misalnya: Anti Kekerasan, Digital Literasi (Anti Hoax), Anti Stigma Sosial, Anti Perundungan Daring, Belajar dari Rumah yang Sehat, dll. Pada akhirnya dengan mendorong pemerintah melibatkan dan mewadahi partisipasi anak dalam penyusunan, penetapan dan penerapan kebijakan dalam situasi krisis Covid-19, seperti yang telah diamanatkan dalam PP No. 45 Tahun 2017 dan Surat Edaran Kemendagri No. 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 akan mewujudkan merdeka belajar yang lebih holistik dan inklusif.

⁶⁵ UNICEF, WHO, IRCF: "Key Messages and Actions for Covid-19 Prevention and Control in Schools March 2020"

Referensi

Berkman, B.E., 2008. Mitigating pandemic influenza: the ethics of implementing a school closure policy. *Journal of Public Health Management and Practice*, 14(4), pp.372-378.

Centre for International Research on Education Systems, 2020. Impact of learning from home on educational outcomes for disadvantaged children. Victoria University

Cauchemez, S., Van Kerkhove, M.D., Archer, B.N., Cetron, M., Cowling, B.J., Grove, P., Hunt, D., Kojouharova, M., Kon, P., Ungchusak, K. and Oshitani, H., 2014. School closures during the 2009 influenza pandemic: national and local experiences. *BMC infectious diseases*, 14(1), p.207.

CNN Indonesia (2020). FGSJ Sebut Kualitas Pendidikan Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200502091822-20-499370/fsgj-sebut-kualitas-pendidikan-indonesia-turun-saat-corona> diakses pada 18 Mei 2020

Drane, C., Vernon, L. and O'Shea, S., 2020. The impact of 'learning at home' on the educational outcomes of vulnerable children in Australia during the Covid-19 pandemic.

Frenette, M., Frank, K. and Deng, Z., 2020. School Closures and the Online Preparedness of Children during the Covid-19 Pandemic.

Global Partnership for Education dalam website: <https://www.globalpartnership.org/> "Mitigating Covid-19 Impact and getting Education system and running again lessons Sierra" diakses pada 13 Mei 2020

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nations Children's Fund (2017). Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia Jakarta: BAPPENAS dan UNICEF

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2020): Jajak Pendapat Ada Apa Dengan Covid-19, Jakarta: KPPPA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020) <http://bersamahadapikorona.kemendikbud.go.id/>

Kompas (2020) Diterbitkan 15 Mei 2020. Tahun ajaran baru, Pemprov DKI siapkan 3 skema siswa belajar di sekolah, diakses 21 Mei 2020

Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) dan Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) 2020. Pandangan Anak Terhadap Covid-19 di Indonesia, Jakarta: PKPA & Aliansi PKTA

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2020) <https://setkab.go.id/inilah-perubahan-kebijakan-pendidikan-selama-masa-pandemi-covid-19/> di akses pada 20 Mei 2020

UNESCO & UNICEF (2020). Framework for reopening schools. UNESCO · UNICEF

UNESCO, (2020a). 10 recommendations to ensure that learning remains uninterrupted. Tersedia di <https://en.unesco.org/news/covid-19-10-recommendations-plan-distance-learning-solutions>

UNICEF, WHO, IRCF: "Key Messages and Actions for Covid-19 Prevention and Control in Schools March 2020"

Wahana Visi Indonesia (2020). STUDI MENDENGARKAN SUARA ANAK: SUARAKU LAWAN COVID-19 PENDAPAT DAN PENGALAMAN ANAK-ANAK SELAMA MASA JAGA JARAK. Tangerang Selatan: WVI

WeForum (2020) <https://www.weforum.org/agenda/2020/05/coronavirus-countries-schools-education-covid19-reopen-classroom/> diakses 13 Mei 2020 Pkl. 19.07

World Bank (2020) <https://blogs.worldbank.org/education/managing-impact-covid-19-education-systems-around-world-how-countries-are-preparing> diakses pada 19 Mei 2020

Washington Post (2020). <https://www.washingtonpost.com/education/2020/03/26/nearly-14-billion-children-around-globe-are-out-school-heres-what-countries-are-doing-keep-kids-learning-during-pandemic/> diakses pada 19 Mei 2020

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah:

Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Kepres No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019

Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019

Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/104/2020

Kemendagri - Surat Edaran No. 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019

UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 51

UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

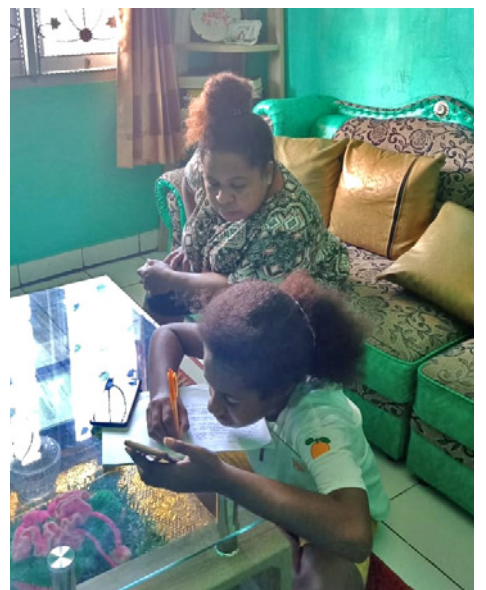
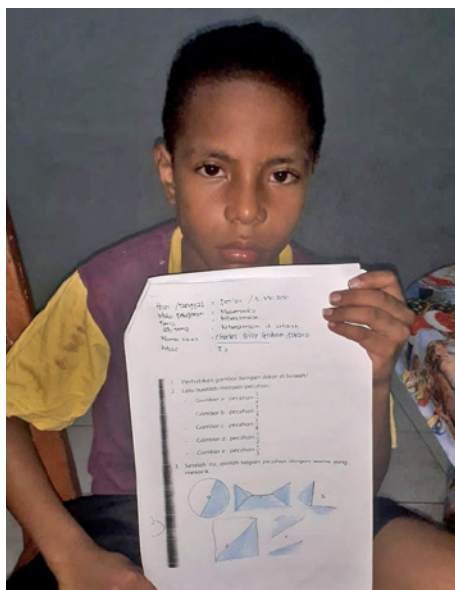
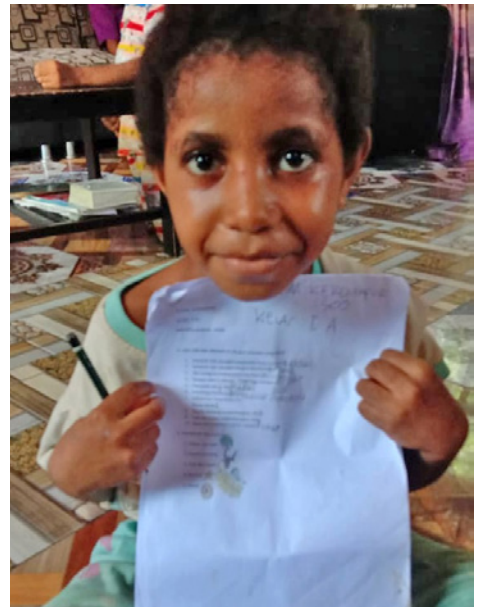
SE Sesjen Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19

Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi

Diskusi Daring:

Diskusi daring WVI "Tantangan dan Praktik Baik Belajar dari Rumah di daerah 3T", pada 20 Mei 2020 bersama Seknas SPAB Kemendikbud, Guru, Bupati dan Kepala Dinas dari Papua, NTT, Kalimantan Barat

Diskusi Daring Suaraku Lawan Covid-19 pada 6 Mei 2020 bersama Deputi Tumbuh kembang Anak KPPPA, Forum Anak Daerah dan Seknas SPAB Kemendikbud.



©Wahana Visi Indonesia/Joy Maluyo.
Judul Foto: Kegiatan belajar anak di rumah selama pandemi
di Kabupaten Sentani, Papua, Indonesia

WAHANA VISI INDONESIA

Kantor Bintaro

Jl. Graha Bintaro GB/GK 2 No.9
Parigi Baru, Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15228
Indonesia
Telp. +62 21 29770123

Kantor Gedung 33

Jl. Wahid Hasyim 33
Jakarta 10340
Telp. +62 21 390 7818

Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membawa perubahan yang berkelanjutan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku, atau gender.



Wahana Visi Indonesia

www.wahanavisi.org



wahanavisi_id